

## TAKSONOMI KONFLIK-KONFLIK INTERNAL DI INDONESIA SEBAGAI POTENSI PERANG PROXY

### TAXONOMY OF INTERNAL CONFLICTS THAT LEADS INTO PROXY WAR IN INDONESIA

Yosua Praditya Suratman<sup>1</sup>

Sekretariat Dewan Analisis Strategis  
(ypsuratman@gmail.com)

**Abstrak** – Bergesernya ancaman konvensional kedalam bentuk ancaman non-konvensional merupakan ancaman besar bagi Indonesia. Ancaman non-konvensional berupa perang proxy sudah dan tengah dijalankan di Indonesia kedalam beberapa bentuk, termasuk didalamnya adalah konflik internal. Jumlah konflik internal, baik horizontal maupun vertikal yang semakin meningkat sejak era reformasi dapat saja terjadi karena memang ada pengaruh dan kepentingan asing. Perang proxy cenderung lebih dipilih oleh kelompok kepentingan karena biayanya yang murah dibandingkan perang konvensional, akan tetapi dampak dan daya hancurnya sangat signifikan. Memang menjadi sulit apabila pemerintah mencoba melihat apakah konflik terjadi secara alamiah atau ada unsur kesengajaan (*by designed*). Untuk itu perlu melakukan pemetaan konflik internal yang telah dan sedang terjadi di berbagai bidang, khususnya di luar bidang militer. Pemetaan ini akhirnya akan menuntun pemerintah, terlebih aparat keamanan dalam menelusuri aktor dan kelompok-kelompok kepentingan. Konflik internal saat ini memang dilatarbelakangi oleh berbagai aspek, yaitu ideologi, politik, ekonomi, dan sosial-budaya, yang berpotensi menjadi perang proxy di Indonesia. Akhirnya, perang proxy akan tetap dipilih oleh aktornya mengingat sumber daya yang digunakan (manusia dan alam) adalah milik negara yang dituju. Posisi Indonesia yang strategis, serta besarnya kekayaan sumber daya alam yang dimiliki, membuat Indonesia akan selalu berada di bawah bayang-bayang ancaman perang proxy.

**Kata Kunci** : Perang proxy, konflik internal, keamanan

**Abstract** – The conventional threats now have been shifted into unconventional threats which is now considered as one of the biggest threats for Indonesia. Proxy war is an unconventional threat and it is happening now in Indonesia through internal conflicts. The number of internal conflicts, whether vertical and horizontal, have increased significantly since the Reformation era started, and it is believed there is a third party who has a role on that. Many countries prefer proxy war due to its efficiency reasons and it creates a great result of destruction. It is not easy for the government to forecast whether the conflicts are naturally emerged or designed by third parties. Security apparatus, therefore, must design a conflict mapping in every non-military sector. The mapping will lead us in exploring all parties who have a connection to conflicts. It must be realized that internal conflicts are influenced by many factors such as ideology, politics, economics, and social, which later will continue to proxy war threats. Proxy war, therefore, will always be chosen due to its efficiency because they will not use their own resources. The strategic position of Indonesia makes Indonesia to become an object of proxy war.

**Keywords:** proxy war, internal conflict, security

<sup>1</sup> Penulis adalah alumni Manajemen Pertahanan Cohort IV Universitas Pertahanan dan bekerja di Sekretariat Dewan Analisis Strategis sejak 2015 - sekarang.

## Pendahuluan

Berbagai tantangan yang saat ini tengah dihadapi Indonesia cenderung bukan agresi militer dari suatu negara, namun lebih pada ancaman yang tidak terlihat. Ancaman akan selalu muncul dari aktor-aktor eksternal yang memiliki kepentingan besar di Indonesia. Tanpa disadari saat ini, Indonesia sudah dan tengah menghadapi perang *proxy*. Hal ini ditegaskan pula oleh Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo yang mengatakan perang *proxy* di Indonesia terjadi berbagai cara, yaitu perang melawan narkoba, konflik antar kelompok, serta perang menghadapi ancaman terorisme-radikalisme.<sup>2</sup> Salah satunya adalah konflik horizontal yang masih terjadi dan tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Memasuki era reformasi ditandai dengan euforia publik dalam menyatakan pendapatnya, namun hal ini cukup sering menimbulkan gesekan antara satu dengan yang lain, sehingga pada akhirnya menyulut konflik internal di Indonesia.

Perdebatan masih terus terjadi terkait konflik internal yang dianggap terjadi secara alamiah atau karena pengaruh dari kepentingan asing, terutama intelijen asing. Akan menjadi sulit untuk menyatakan bahwa konflik internal terjadi karena intelijen asing tanpa dibuktikan melalui fakta yang kuat dan relevan. Oleh karenanya, taksonomi

konflik perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana konflik-konflik internal di Indonesia sudah dan tengah berkembang, sehingga aktornya dapat diketahui. Dari sinilah dapat dilihat apakah konflik tersebut dapat mengarah pada perang *proxy* yang tentunya dipengaruhi oleh pihak asing. Kajian ini akan menjabarkan dan menganalisis jenis-jenis konflik yang sudah, sedang, dan berpotensi terjadi yang akhirnya dapat diprediksi bahwa kesemuanya terjadi memang sengaja dibentuk (*by designed*). Kajian akademis ini akan melihat tiga hal utama, yaitu, *pertama*, perkembangan dan indikasi perang *proxy* di Indonesia; *kedua*, ancaman konflik sebagai perang *proxy* yang tengah dihadapi; dan *ketiga*, solusi strategis untuk menyelesaikan konflik internal di kelompok masyarakat sipil.

## Memahami Konflik dan Tahapannya

Pada dasarnya, konflik adalah hubungan yang memiliki sasaran dan tujuan yang tidak sejalan dalam hubungan antara dua pihak atau lebih. Lebih lanjut, konflik meliputi berbagai sikap dan tindakan yang menyebabkan kerusakan secara fisik, mental, sosial, atau lingkungan sekitar.<sup>3</sup> Dimana kerugian yang didapat tidak hanya harta benda saja, namun juga bisa sampai pada kehilangan nyawa dalam jumlah yang cukup besar. Situasi seperti ini jelas mengganggu stabilitas keamanan nasional apabila tidak tertangani dengan

<sup>2</sup> Penyampaian Jendral TNI Gatot Nurmantyo pada kuliah umum di Universitas Pertahanan, Aula Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian, Sentul, Bogor, pada 30 Agustus 2016.

<sup>3</sup> Christopher Mitchell, "Conflict, Social Change, and Conflict Resolution: An Enquiry", Berghof Conflict Research, 2005, hlm 7, dalam <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.16.2268&rep=rep1&type=pdf>.

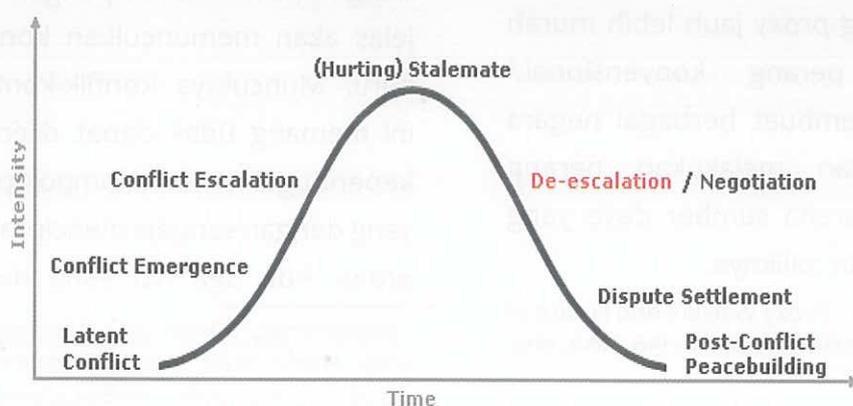
cepat oleh pemerintah, utamanya oleh aparat keamanan. Konflik sendiri terbagi dua, yaitu konflik internal maupun konflik eksternal. Konflik eksternal disebabkan oleh faktor luar (pihak asing), dimana umumnya terjadi karena kesepakatan yang tidak tercapai antara pemerintah dengan pihak luar. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus seperti konflik di wilayah perbatasan, agresi militer dari pihak asing, konflik antar negara karena kasus cyber atau penyadapan, yang dimana aktornya pun adalah negara dengan negara.

Sementara konflik internal terjadi dengan menggunakan sumber daya di dalam negeri (manusia dan dana), dan ini pun terbagi menjadi dua kelompok, yaitu konflik vertikal yang tercermin dari konflik antara pemerintah dengan masyarakat sipilnya dan konflik horizontal yang terjadi di antara kelompok sipil sendiri. Perlu diketahui tahapan konflik dari awal sampai akhir, dimana hal ini dapat dilihat dari dilihat pada bagan berikut: (Gambar 1)

Model di atas menunjukkan bahwa pada tahap *latent conflict* menandakan

setiap daerah/wilayah memiliki potensi konflik sama dengan daerah lainnya. Namun yang membedakan adalah konflik tersebut muncul dengan latar belakang yang berbeda. Pada tahap *conflict emergence* menjelaskan bahwa konflik akan muncul apabila sudah terjadi perbedaan pendapat dan opini pada sebagian kelompok atau individu. Kemudian, masuk pada tahap *conflict escalation* menunjukkan gesekan antar individu terjadi semakin meningkat yang akhirnya menuju pada jalan buntu (*stalemate*). Tahap ini merupakan tahapan yang paling tinggi dimana kelompok memutuskan untuk bertikai dibandingkan mencari alternatif lain. Akan tetapi, dinamika konflik pasti akan menurun dengan ditandai oleh penurunan eskalasi konflik melalui berbagai negosiasi yang dilakukan oleh pihak yang bertikai. Tahap *dispute settlement* menjadi bagian awal penyiapan upaya perdamaian. Akhirnya, upaya terakhir yang harus dilakukan adalah tahap *peace building* untuk memulihkan hubungan masing-masing pihak yang berseteru. Tujuannya

Gambar 1. Conflict escalations



Sumber: Louis Kriesberg, "De-escalation Stage." *Beyond Intractability*. Eds. Guy Burgess and Heidi Burgess. Conflict Information Consortium, University of Colorado, Boulder, September 2003 <http://www.beyondintractability.org/essay/de-escalation-stage>.

adalah untuk menghindari konflik serupa antar kelompok atau individu yang sama terulang kembali.

### **Perkembangan dan Indikasi Perang Proxy di Indonesia**

Sebelum menjelaskan definisi perang proxy, maka terlebih dahulu menjabarkan perkembangan perang proxy di berbagai belahan dunia. President AS Dwight D. Eisenhower mengatakan perang proxy adalah bentuk perang termurah atau setidaknya upaya untuk menjaga zona konflik agar tetap panas sesuai yang diinginkan.<sup>4</sup> Perang proxy sendiri adalah perang yang menggunakan pihak ketiga sebagai pihak pengganti secara tidak langsung dalam rangka menghasilkan serangkaian hasil strategis yang ingin dicapai.<sup>5</sup> Sejak tahun 1964, politikus internasional Karl Deutsch menyebut perang proxy adalah konflik antara dua negara namun peperangannya dilakukan di tanah negara ketiga, serta membuat perang tersebut seolah-olah adalah konflik internal di negara ketiga. Perang tersebut menggunakan sumber daya manusia, alam, dan wilayah negara ketiga sehingga perang proxy jauh lebih murah dibandingkan perang konvensional.<sup>6</sup> Hal ini yang membuat berbagai negara terkesan enggan melakukan perang konvensional karena sumber daya yang digunakan adalah miliknya.

<sup>4</sup> Andrew Mumford, "Proxy Warfare and Future of the Conflict", *The RUSI Journal*, Vol. 158. No.2, hlm. 40-46, 2013.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Harry Eckstein (ed), "Internal War, Problems, and Approaches", (New York: Free Press of Glencoe, 1964), hlm. 9.

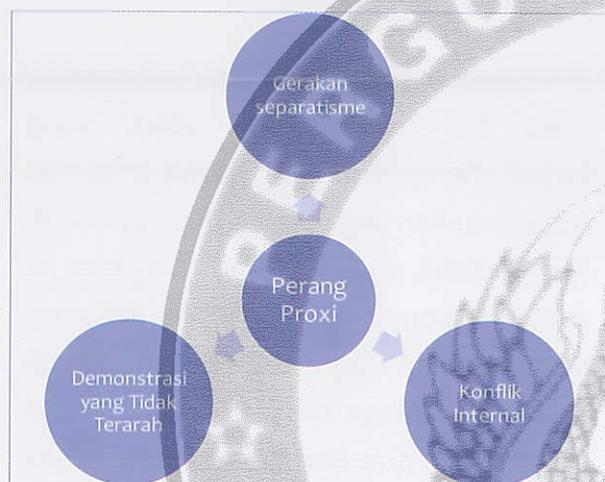
Perang proxy tengah terjadi di Indonesia namun hanya sebagian kelompok yang menyadari akan hal itu. Menurut Dewan Analisis Strategis (DAS) Badan Intelijen Negara pada 2014, Indonesia memang perlu menyadari konflik akibat perang proxy antar kekuatan elit dunia. Konflik berupa perang non fisik dari negara besar yang merasa kepentingan nasionalnya terusik, sehingga membuat mereka mencari kesempatan untuk menyerang lawan politiknya melalui pertarungan di lahan negara lain (termasuk Indonesia).<sup>7</sup> Lebih lanjut menurut Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo, perang proxy terjadi di Indonesia karena negara asing berlomba-lomba ingin menguasai Indonesia yang kaya akan SDA-nya.<sup>8</sup> Perang proxy memang kompleks karena perang tersebut dikendalikan oleh negara lain dan taktik yang digunakan pun berbeda dengan perang konvensional. Bahkan, lepasnya Timor-Timur dipercaya sebagai bentuk perang proxy karena memang Timor-Timur dikehendaki terpisah dari Indonesia oleh negara lain. Meningkatnya jumlah populasi dunia yang tidak diimbangi dengan ketersediaan pangan dan energi jelas akan memunculkan konflik-konflik baru. Munculnya konflik-konflik seperti ini memang tidak dapat dilepaskan dari kepentingan antar kelompok/pihak ketiga yang dengan sengaja menciptakan perang proxy. Ada tiga hal yang dapat dilihat

<sup>7</sup> Muhammad, Hikam (ed), *Menyongsong 2014 – 2019: Memperkuat Indonesia dalam Dunia yang Berubah*, (Jakarta: Rumah Buku, 2014), hlm. 62.

<sup>8</sup> "Panglima TNI: Proxy War Mengancam Indonesia", dalam <http://nasional.kompas.com/>, 19 Mei 2016, diakses pada 27 Januari 2017.

sebagai indikasi bahwa perang *proxy* memang sudah dimulai di Indonesia, yaitu gerakan separatis, demonstrasi yang tidak terarah, dan konflik internal (antar kelompok).<sup>9</sup> Yang dapat dilihat pada bagan di bawah:

**Gambar 2.** Tiga Hal Indikasi Perang *Proxy* di Indonesia



Sumber: dari pernyataan Panglima TNI<sup>10</sup> yang kemudian dijabarkan oleh Penulis

a. Gerakan Separatisme

Tercatat ada tujuh gerakan separatisme yang terjadi di Indonesia sejak era kemerdekaan sampai sekarang. Ketujuh gerakan separatisme tersebut, adalah (1) Gerakan Separatisme PKI, Madiun-1948 dan G30S-1965; (2) Pemberontakan RMS (Republik Maluku Selatan)-1950; (3) PRRI (Pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia; (4) Permesta (Perjuangan Rakyat Semesta) - 1957; (5) DI/TII Kartosoewiryo-1949, Daud

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

Beureuh-1953, Ibu Hajar-1950, Amir Fatah-1950, Kahar Muzakar-1953; (6) Gerakan Aceh Merdeka (GAM), dimulai 1976 dan berakhir pada 2005 melalui Perjanjian Helsinki; dan (7) Kelompok Separatis Papua yang sampai saat ini masih memberikan ancaman internal.<sup>11</sup> Fakta-fakta ini memperlihatkan bahwa Indonesia tidak terlepas dari ancaman gerakan separatis yang selalu mengancam untuk melepaskan diri dari Indonesia. Tentunya, hal ini merupakan hal yang diinginkan dari kelompok-kelompok eksternal yang memiliki kepentingan merugikan Indonesia. Perlu diperhatikan, ancaman gerakan separatis Papua masih menjadi persolahan yang belum terselesaikan, apalagi cukup banyak negara Melanesia yang mendukung Papua untuk memerdekakan diri.

b. Demonstrasi Yang Tidak Terarah

Demonstrasi sesungguhnya bukan suatu alat untuk melakukan tekanan, melainkan mekanisme untuk mengedepankan aspirasi dari kelompok sipil yang sah dan dijamin oleh Undang-Undang.<sup>12</sup> Sampai saat ini, demonstrasi merupakan sarana yang paling sering digunakan oleh kelompok, namun dengan semakin

<sup>11</sup> Yosua Praditya, *Keamanan di Indonesia*, (Jakarta: Nadi Pustaka, 2015), hlm.149.

<sup>12</sup> Muhammad Reza Hermanto (Koordinator), Arfianto Purbolaksono, Lola Amelia, Zihan Syahayani, The Indonesian Institute Centre For Public Policy Research, "Melihat Aksi 4/11 dalam hubungan Islam dan Politik", *Jurnal Update Indonesia* Vol X, No. 11, November, 2016, hlm. 6.

maraknya aksi demonstrasi yang terjadi hampir setiap hari membuat publik mulai jenuh karena tidak melihat hasil dari aksi tersebut. Sejak tahun 2012, aksi demonstrasi di Indonesia dianggap berlebihan dan cenderung anarkis.<sup>13</sup> Bahkan, pada 2011, Indonesia sudah dianggap sebagai negara dengan jumlah demonstrasi terbanyak dari 113 negara. Hal ini terlihat dari jumlah dan karakter mahasiswa Indonesia yang termasuk sulit dikendalikan karena doktrinasi yang bersifat merusak dalam tatanan kekerasan, termasuk penataan kelembagaan mahasiswa di tingkat perguruan tinggi.<sup>14</sup>

c. Konflik internal/Antar Kelompok

Tidak dapat dipungkiri, memasuki era reformasi jumlah konflik sosial Indonesia terus meningkat. Berdasarkan data dari Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, pada tahun 2013 terjadi 93 kasus, pada 2014 terjadi 83 kasus, dan pada tahun 2015 menurun menjadi 26 kasus. Konflik tersebut terbagi menjadi menjadi tiga permasalahan yaitu Ipoleksosbud, SARA, dan konflik sengketa lahan.<sup>15</sup> Meskipun

<sup>13</sup> "Demonstrasi yang Kebablasan," dalam <https://www.tempo.co>, 28 Maret 2012, diakses pada 30 Januari 2017.

<sup>14</sup> "Indonesia Urutan Pertama Aksi Demonstrasi," dalam <http://www.antarane.ws.com/>, diakses pada 30 Januari 2017.

<sup>15</sup> Lihat pada "Perbandingan konflik sosial berdasarkan sumber konflik (UU No.7/2012) pada semester awal di tahun 2013, 2014, dan 2015 medio kuartal", dalam [ada tren penurunan jumlah konflik sosial, namun tidak tertutup kemungkinan konflik sosial justru dapat berkembang di tahun 2017 mengingat banyaknya perbedaan pendapat, terutama dari masyarakat ibu kota yang dapat berdampak dan bergeser ke masyarakat komunal.](http://kesbangpol.kemendagri.</a></p></div><div data-bbox=)

Ketiga indikasi di atas merupakan bukti beberapa gejala sosial yang terjadi memperlihatkan bahwa ancaman negara bukan lagi perang konvensional. Karakteristik ancaman telah bergeser ke arah non-konvensional dimana aktornya sudah bukan lagi negara lain, tetapi warga negaranya sendiri. Pengaruh dari negara luar pun bisa saja terjadi karena perang *proxy* dilakukan tidak hanya di wilayah negara maju, namun lebih sering di wilayah negara berkembang.<sup>16</sup> Konflik sosial merupakan contoh nyata dari perang *proxy* yang saat ini masih terjadi di wilayah Timur Tengah, dan tidak tertutup kemungkinan konflik-konflik sosial seperti tersebut diarahkan di wilayah Indonesia.

### Perkembangan Konflik Sejak Era Reformasi Sampai Sekarang

Rangkaian konflik yang terjadi di Indonesia, terutama di era reformasi, perlu menjadi perhatian dari aparat, akademis, dan pemangku kepentingan lainnya. Adanya lonjakan tren yang

go.id, diakses pada 31 Januari 2017.

<sup>16</sup> Adam Paffenroth, "Outsourcing Conflict "An Analysis of the Strategic Underpinnings of Proxy Warfare", Tesis, (Maryland, Baltimore: John Hopkins University, 2014), hlm. 4, dalam <https://jscholarship.library.jhu.edu/bitstream>.

meningkat secara signifikan dibandingkan dua era sebelumnya menunjukkan bahwa kondisi keamanan Indonesia harus diberikan perhatian yang lebih serius. Artinya, eskalasi konflik di Indonesia yang terus meningkat, sangat terbuka kemungkinannya dikarenakan pengaruh dari aktor-aktor luar, terutama ketika mereka melihat banyaknya perbedaan-perbedaan pendapat di masyarakat sipil Indonesia sendiri. Menurut Mitchell, konflik jelas terjadi ketika dua pihak merasa memiliki sasaran dan tujuan yang tidak sejalan.<sup>17</sup> Selanjutnya, menurut Fisher, konflik dapat berupa tindakan, perkataan, sikap, berbagai struktur atau sistem yang menyebabkan kerusakan secara fisik, mental, dan sosial.<sup>18</sup> Menurut Praditya, secara garis besar, konflik internal di Indonesia disebabkan oleh tiga hal, yaitu: <sup>19</sup>

a. Faktor Politik dan Kelembagaan

Konflik terjadi karena lemahnya kelembagaan atau instansi pemerintahan di dalam suatu negara, sehingga tidak mampu mengelola segala isu politik yang ada. Lemahnya suatu lembaga dapat ditemukan pada beberapa contoh di negara-negara gagal (*failed state*). Selain itu, konflik juga dapat disebabkan oleh bentuk

ketidakpercayaan warga negara kepada pemerintahannya atas kebijakan-kebijakan yang tidak memihak rakyat, atau terhadap sistem pemerintahan yang dianggap sudah rusak, korup, dan anti-kritik.

b. Faktor Sosial – Ekonomi

Besarnya jurang antara si kaya dan si miskin jelas sangat berpengaruh pada munculnya konflik. Tentunya publik masih diingatkan oleh peristiwa kerusuhan Mei 1998, dimana warga miskin melakukan aksi penjarahanke beberapa toko yang umumnya dimiliki oleh warga Tionghoa yang kala itu dianggap sebagai penduduk yang kaya. Apabila dilihat lebih makro, misalnya sampai pada tingkatan provinsi, maka ketimpangan antara provinsi yang maju dan tidak maju pun juga berpotensi menimbulkan konflik vertikal. Sementara pada faktor sosial, konflik Tolikara di Papua yang ditandai dengan penyerangan terhadap umat Islam ketika menunaikan Sholat led, dilanjutkan dengan pembakaran mushola pada Jumat 17 Juli 2015. Sebagai akibatnya, saat itu konflik ini hampir menyebar ke beberapa wilayah lain karena ada sebagian pihak yang ingin melakukan aksi balasan. Namun beruntung hal itu tidak terjadi karena aparat mampu menahan agar publik tidak mudah terprovokasi.<sup>20</sup>

<sup>17</sup> Christopher Mitchell, "Conflict, Social Change, and Conflict Resolution An Enquiry", Berghof Research Center for Conflict Management, 2005, hlm 7, dalam <http://citeseerx.ist.psu.edu>, diunduh pada 31 Januari 2017.

<sup>18</sup> Simon Fisher, "Working With Conflicts: Skills and Strategies for Actions", (US: Zed Books, 2000), hlm. 8.

<sup>19</sup> Yosua Praditya, *op.cit*, hlm. 138-139.

<sup>20</sup> "Kerusuhan di Tolikara Jangan Meluas Jadi Konflik Agama," dalam <http://nasional.kompas>.

Tabel 1. Jumlah Korban Konflik Lahan Agraria

Jumlah Konflik Agraria		Jumlah Korban dalam konflik Agraria		Luas Wilayah Konflik Agraria
2012	198 kasus	Tewas	21 orang	Tahun 2012: 318.248 ha
2013	369 kasus	Tertembak	30 orang	Tahun 2013: 1.281.660 ha
Total	567 kasus	Penganiayaan	130 orang	Total: 1.599.908 ha

Sumber: Konsorsium Pembaruan Agraria, 2014.

c. Faktor Lingkungan dan Sumber Daya Alam

Eksplotasi sumber daya alam secara besar-besaran yang diikuti oleh ketidakadilan pada pembagian hasilnya pasti akan melahirkan konflik. Sejauh ini, konflik yang disebabkan oleh perebutan hasil sumber daya alam di Indonesia masih tinggi. Dalam sistem pemerintahan yang baik, seharusnya sumber daya alam dapat dinikmati bersama dengan memperhatikan asas kebersamaan (*equity*), efisiensi (*efficient*), dan keberlanjutan (*sustainability*). Konflik akan semakin panas ketika ketidakadilan dirasakan oleh penduduk lokal terhadap kehadiran beberapa perusahaan asing. Tidak jarang konflik perebutan lahan agraria terjadi antara penduduk lokal, dimana berdasarkan data yang diperoleh KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria) dapat dilihat pada tabel di atas:<sup>21</sup> (Tabel 1)

Ketiga aspek di atas merupakan faktor penyebab utama dari konflik internal sendiri. Memang aktor, sumber daya, dan lain sebagainya berada di Indonesia, bukan di negara asing. Namun sekali lagi, hal ini tidak tertutup kemungkinan bahwa tidak ada keterkaitan asing sama sekali terhadap konflik internal. Perlu diingat kembali bahwa konsep dari perang *proxy* adalah menggunakan sumber daya di negara yang dituju, sehingga seolah-olah negara yang dituju tersebut tengah menghadapi konflik di wilayahnya sendiri.<sup>22</sup> Hal ini jelas tidak membutuhkan dana sebesar perang konvensional, apalagi pasukan tempur untuk membuat konflik di suatu negara yang dituju. Perang *proxy* yang dilakukan adalah dengan membuat konflik horizontal di beberapa wilayah dengan asumsi konflik tersebut terjadi seolah-olah alamiah.

**Jenis-Jenis Konflik Internal yang Telah Terjadi di Indonesia**

Eskalasi konflik yang meningkat harus mendapat perhatian dari pemerintah dan setiap *stakeholder* terkait, terutama para akademisi. Kenaikan tren konflik internal di Indonesia perlu dipetakan

<sup>22</sup> Eckstein, *op.cit.*

com/read/, 17 Juli 2015, diakses pada 31 Januari 2017.

<sup>21</sup> "Ini Data Konflik Agraria di Tanah Air Sepanjang Tahun 2013," dalam <http://www.kpa.or.id/>, diakses pada 31 Januari 2017.

berdasarkan jenisnya. Oleh karena itu berikut penjabaran dari konflik-konflik internal yang pernah terjadi:<sup>23</sup>

- Konflik SARA

Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam etnis, budaya, dan agama, sehingga isu SARA merupakan hal yang sensitif dan patut selalu diperhatikan oleh pemerintah. Sejarah konflik Sampit di Kalimantan antara suku Dayak dan Madura yang mengakibatkan 500 korban jiwa dan sekitar 100.000 warga Madura kehilangan tempat tinggal pada 2001. Selain itu, pada 2014 lalu, konflik suku Dani dan suku Moni di Papua yang disebabkan karena permasalahan lahan. Kemudian tidak berselang lama pada 2015 terjadi konflik Tolikara di Papua, yang ditandai dengan penyerangan pada umat Islam setelah menunaikan Sholat. Akhirnya pemerintah juga tidak dapat menutup mata dengan semakin panasnya tensi menjelang Pilkada DKI karena isu SARA masih membayangnya. Hal ini tak lepas sebagai dampak dari dinamika di Pilgub DKI Jakarta, yang dikhawatirkan bisa menular ke daerah lain yang juga menggelar pilkada. Oleh karenanya, potensi ini perlu diantisipasi aparat keamanan dan penyelenggara pemilu, agar pilkada serentak berjalan aman, lancar, dan damai.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Praditya, *op.cit.* hlm. 144-149.

<sup>24</sup> "Isu Sara Masih Membayangi Pilkada," dalam

- Konflik Antar Ormas

Dalam kehidupan berdemokrasi, keberadaan dan pertumbuhan jumlah ormas menjadi hal yang tidak dapat dihindari. Gesekan antar ormas yang ada di ranah publik merupakan isu yang harus diperhatikan, karena gesekan tersebut muncul sebagai akibat dari perbedaan pandangan yang sah-sah terjadi dalam sistem demokrasi. Contoh konflik FPI (Front Pembela Islam) dan GMBI (Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia) pada 20 Januari 2017, merupakan contoh konflik antar ormas di Indonesia. Hal ini membuat petisi digulirkan kepada pihak Pemerintah Provinsi Jabar untuk menyuarkan wilayah Jabar menjadi kondusif. Aksi ini dilakukan melalui pertemuan bersama sekitar 37 ormas lainnya untuk.<sup>25</sup>

- Konflik Pilkada

Konflik Pilkada masih menjadi tantangan bagi pemerintah, baik saat ini maupun kedepannya. Pilkada menjadi ajang pesta demokrasi setiap periodenya dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Masyarakat Indonesia memerlukan pendidikan politik yang baik, serta tanggung jawab partai politik, tim sukses, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pemerintah Daerah untuk mencegah konflik Pilkada terus

<http://www.beritasatu.com/>, 1 Januari 2017, diakses pada 3 Februari 2017.

<sup>25</sup> "Menyusul Konflik FPI dan GMBI, Gabungan Ormas Suarkan Petisi Jabar Kondusif", 20 Januari 2017, dalam <http://nasional.republika.co.id/>, diakses pada 3 Februari 2017.

berulang. Tidak main-main, konflik pilkada kerap diwarnai pengrusakan dan pembakaran gedung-gedung perkantoran pemerintahan daerah di beberapa wilayah Indonesia. Kerugian finansial ini jelas menjadi tanggungan negara. Selain itu perhatian pemerintah terhadap Pilkada DKI harus ditingkatkan karena DKI adalah ibu kota Indonesia yang merupakan cerminan bagi daerah-daerah lain, serta pengaruh sosial Pilkada DKI sangat kuat terhadap wilayah lainnya.

- **Konflik Perebutan Lahan dan Sumber Daya Alam**

Konflik ini masih kerap diwarnai oleh perselisihan antara investor asing dengan penduduk lokal. Tuntutan penduduk lokal untuk meminta pekerjaan di perusahaan tambang asing menjadi polemik di beberapa wilayah kabupaten Indonesia. Tidak jarang yang terjadi adalah demonstrasi yang akhirnya menyalahkan pemerintah daerah yang dianggap tidak dapat memberikan pekerjaan kepada rakyatnya. Ditambah dengan alasan-alasan lain yang menyudutkan pemerintah yang dianggap pro asing ketimbang rakyatnya, sehingga yang terjadi tidak hanya konflik horizontal, tetapi juga konflik vertikal. Terjadinya konflik yang disebabkan oleh perebutan hasil sumber daya alam dapat memberikan dampak negatif

kepada negara, karena tingkat kepercayaan investor asing maupun nasional tentunya akan menurun.

### **Meningkatnya Jumlah Konflik Internal Pasca Reformasi dan Kaitannya dengan Perang Proxy**

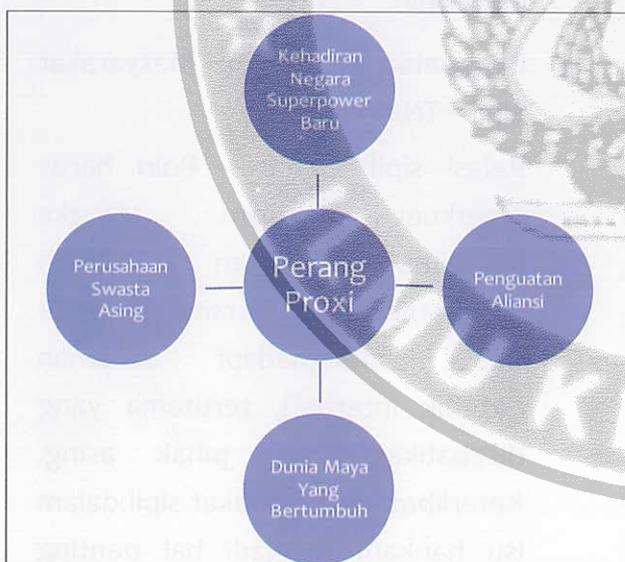
Memasuki era reformasi, “Konflik SARA” menjadi tidak asing bagi telinga warga Indonesia. Kebebasan berpendapat yang kebablasan pada akhirnya justru menjadi pemicu bagi lahirnya konflik itu sendiri. Terutama bagi Indonesia yang masyarakatnya terdiri dari berbagai macam suku, budaya, bahasa, dan agama, sangat rentan terhadap terjadinya konflik-konflik yang bernuansa SARA. Tidak heran, konflik SARA di Indonesia berkembang pasca jatuhnya era Orde Baru, karena konflik pasti akan timbul pada masa-masa perubahan politik, ekonomi, dan sosial. Belum lagi, ketika kondisi tersebut ditambah dengan rasa kekecewaan, tidak puas, dan kemarahan rakyat terhadap sebuah kepemimpinan. Kondisi seperti ini akhirnya mengarah pada mobilisasi, mulai dari tindakan politik, demonstrasi, dan cara-cara kekerasan lainnya. Konflik yang terjadi di Ambon, Poso, Sambas, Sampit, Papua, dan lain-lain, memperlihatkan betapa Indonesia sangat rawan akan terjadinya konflik. Tentunya hal ini dapat merugikan stabilitas nasional yang memiliki dampak sangat luas.<sup>26</sup>

Jumlah konflik internal memang bisa mengarah ke dalam bentuk perang proxy. Bahkan sebenarnya konflik-konflik internal yang terjadi adalah sebagian

<sup>26</sup> Praditya, *op.cit*, hlm. 161.

bentuk dari perang *proxy* yang dilakukan asing tanpa disadari oleh pemerintah. Konflik internal yang sarat dipengaruhi oleh dunia maya dan adanya kekuatan negara baru tampaknya memang dapat dihubungkan. Ada empat faktor utama penyebab perang *proxy* yang memang dapat dikaitkan dengan konflik internal yang sudah terjadi di Indonesia. Keempat faktor itu adalah kehadiran negara *Super Power* baru, perusahaan swasta asing, faktor dunia maya yang semakin bertumbuh, dan penguatan aliansi satu sama lain.<sup>27</sup> Hal ini dapat dilihat pada bagan di bawah:

**Gambar 3.** Faktor-Faktor Penyebab Perang Proxy



Sumber: Andrew Mumford, “Proxy Warfare and Future of the Conflict”, *The RUSI Journal*, Vol. 158, No.2, 2013.

Dari gambar di atas, perang *proxy* dipengaruhi oleh dunia maya yang bertumbuh dan kehadiran negara super power baru. Kedua faktor ini terkait dengan perang *proxy* karena: Pertama

<sup>27</sup> Mumford, *op.cit*, hlm. 40-46.

“kehadiran negara *super power* baru”, munculnya negara baru yang memiliki kekuatan militer dan ekonomi yang mampu menyaingi negara adidaya jelas memberikan pengaruh yang kuat terhadap terjadi atau tidaknya perang *proxy*. Indonesia diproyeksi sebagai salah satu superpower di wilayah ASEAN, sehingga tidak tertutup kemungkinan pihak ketiga akan selalu melancarkan perang *proxy* dengan maksud menghambat kemajuan bangsa Indonesia. Terutama pasca reformasi, jumlah konflik internal semakin meningkat dengan latar belakang yang semakin bervariasi. Kedua, adalah “faktor dunia maya yang semakin bertumbuh”, dimana dunia maya menjadi aspek yang perlu diperhatikan mengingat ia memiliki kapasitas dalam bentuk yang bervariasi serta berbiaya rendah dalam memberikan serangan non-militer, baik langsung maupun tidak langsung. Eksistensi dunia maya sangat berperan mendukung pertumbuhan LSM – LSM yang justru memberikan pengaruh kepada pemerintahan, dan bahkan tidak menutup kemungkinan pula aktor-aktor intelijen asing memiliki peran besar dibalik kemunculan beragam organisasi sosial dunia maya. Kemunculan dunia maya yang diisi oleh LSM-LSM asing sering dikaitkan dengan beberapa konflik yang terjadi.

### Solusi Mengatasi Konflik Internal di Indonesia

Dibutuhkan solusi yang dapat terimplementasi dengan baik serta dapat dikoordinasikan oleh setiap pemangku

kepentingan dalam rangka mengatasi tantangan konflik internal di setiap wilayah NKRI. Beberapa solusi tersebut adalah:

- **Penguatan Makna Pancasila**  
Nilai dan makna Pancasila perlu diperdalam dan dijadikan panduan utama bagi setiap bangsa Indonesia, terutama generasi muda. Solusi ini sangat efektif untuk menghadapi isu-isu kemunculan ideologi Komunisme di tengah kehidupan masyarakat akhir-akhir ini. Instrumen ideologi harus dikedepankan dan harus digunakan oleh setiap elemen bangsa Indonesia, terutama dalam menghadapi pengaruh-pengaruh asing yang tidak terlihat yang dapat memecah belah bangsa. Pancasila akan turut menjadi instrumen penengah isu-isu SARA yang kerap dimunculkan oleh kelompok-kelompok kepentingan, terutama dari pihak asing.
- **Keadilan Hukum Bagi Seluruh Bangsa Indonesia**  
Hukum merupakan aspek yang kuat dan mengikat semua bangsa Indonesia. Oleh karena itu, penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat harus dilakukan seadil-adilnya untuk menghindari kecemburuan sosial sebagai akibat hukum yang terkadang tajam ke bawah tetapi tidak ke atas. Implementasi hukum yang tidak adil, apalagi cenderung tajam ke kaum menengah ke bawah jelas

berpotensi menimbulkan baik konflik horizontal dan internal.

- **Penguatan Sistem Politik Yang Sehat**  
Instrumen politik menjadi hal penting dalam melahirkan rangkaian kebijakan negara. Kebijakan tersebut tentu tertuang dalam bentuk UU, Perpres, PP, dan lain-lain, sehingga sangat diharapkan tidak adanya faktor politik praktis yang tidak sehat ketika merumuskan kebijakan untuk keamanan negaranya. Politik praktis yang mendukung kepentingan kelompok/golongan jelas memunculkan konflik internal, terutama di dalam tubuh pemerintah itu sendiri.
- **Penguatan hubungan Masyarakat Sipil – TNI – Polri**  
Relasi sipil – TNI – Polri harus diperkuat dalam rangka mengimplementasikan sistem pertahanan yang bersifat semesta untuk menghadapi ancaman (konflik internal), terutama yang disebabkan oleh pihak asing. Keterlibatan masyarakat sipil dalam isu hankam menjadi hal penting dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia terus mencari format terbaiknya untuk saat ini sampai masa depan.
- **Mempertimbangkan Kembali Urgensi Implementasi Keamanan Nasional**  
Pertimbangan untuk menggagas Keamanan Nasional perlu dipikirkankembali oleh setiap

pemangku kepentingan, terutama oleh Pemerintah sebagai pihak penyelenggara.

Keamanan nasional diperlukan dalam rangka menghadapi dinamika eksternal (termasuk perang *proxy*) yang semakin kompleks, tidak menentu, dan mengancam keamanan bangsa Indonesia. Hadirnya Keamanan Nasional juga akan mengurangi potensi terjadinya *overlapping* antara aparat penyelenggara hankam di Indonesia.

- Pengaturan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Profesional Manajemen pengelolaan lahan dan sumber daya alam yang tidak baik menjadi pemicu konflik di beberapa wilayah daerah. Hal ini akan semakin diperparah apabila muncul anggapan dari publik sendiri bahwa Pemerintah seakan lebih memihak perusahaan asing dibandingkan warga negaranya sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan implementasi tata kelola pengaturan dan pengelolaan SDA harus diatur sebaik-baiknya untuk memajukan kesejahteraan umum sesuai tujuan negara.
- Mengantisipasi Pengaruh Dunia Maya/Sosial Baik pemerintah dan khususnya masyarakat harus mengantisipasi setiap berita, konten – informasi, pesan, dan lain-lainnya yang bersumber dari media sosial. Pengaruh dunia maya yang jelas

mampu memecahbelah bangsa yang berujung pada konflik. Publik diharapkan semakin sadar bahwa pihak asing memiliki potensi untuk mengatur terhadap isi konten media sosial/dunia maya tersebut ke arah negatif.

### Kesimpulan

Dari sejarah kemerdekaan sampai sekarang, Indonesia memiliki pengalaman konflik internal yang cukup banyak dan diprediksi jumlahnya akan terus berkembang dengan latar belakang yang semakin bervariasi. Fakta-fakta konflik internal pada akhirnya membuat bangsa Indonesia akan semakin tertinggal, serta tidak tertutup kemungkinan akan mengarah pada perang *proxy*. Apalagi perang *proxy* sudah pasti menggunakan sumber daya milik Indonesia sehingga membuat aktornya lebih memilih strategi ini dibanding perang konvensional. Dengan demikian, tidak tertutup kemungkinan bahwa pihak ketiga memang memiliki pengaruh terhadap rangkaian konflik yang sudah dan akan terjadi di Indonesia. Posisi strategis Indonesia membuat negara ini selalu kerap disusupi oleh kepentingan asing dengan latar belakang politik, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, sudah saatnya perhatian penuh dari pemerintah dari setiap konflik internal yang terjadi harus benar-benar dilakukan melalui penguatan hubungan antara *stakeholder* terkait di bidang keamanan bersama dengan kehadiran peran masyarakat sipil Indonesia.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Eckstein, Harry (ed). 1964. *Internal War, Problems, and Approaches*. New York : Free Press of Glencoe.
- Fisher, Simon. 2000 *Working With Conflicts: Skills and Strategies for actions*, US: Zed Books.
- Jeong, Ho-Won. 2008. *Understanding Conflict and Conflict Analysis*. London: SAGE Publications.
- Muhammad, Hikam (ed).2014. *Menyongsong 2014 – 2019: Memperkuat Indonesia Dalam Dunia yang Berubah*. Jakarta: Rumah Buku.
- Praditya, Yosua. 2015. *Keamanan di Indonesia*. Jakarta: Nadi Pustaka.

### Jurnal

- Hermanto, Muhammad Reza (Koordinator), Arfianto Purbolaksono, Lola Amelia, Zihan Syahayani. 2016. The Indonesian Institute Centre For Public Policy Research. "Melihat Aksi 4/11 dalam hubungan Islam dan Politik". *Jurnal Update Indonesia*. Vol X. No. 11. November.
- Mumford, Andrew. 2013. "Proxy Warfare and Future of the Conflict". *The RUSI Journal*. Vol. 158. No. 2.
- Singer, PW. 2011. "Corporate Warriors: The Rise of the Privatized Military Industry and Its Ramifications for International Security". *Journal of International Security*. Vol. 26. No. 3.

### Tesis

- Paffenroth, Adam. 2014."Outsourcing Conflict "An Analysis of the Strategic Underpinnings of Proxy Warfare". Maryland, Baltimore: John Hopkins University, dalam <https://jscholarship.library.jhu.edu/bitstream/handle/1774.2/37245/PAFFENROTH-THESIS-2014.pdf>.

### Website

- "Apa Yang Perlu Dikhawatirkan Dari Konflik FPI-GMBI," dalam <http://www.bbc.com>, 19 Januari 2017, diakses pada 2 Februari 2017.
- "Civil War Facts", dalam <http://www.civilwar.org/education/history/faq/>, diakses pada 27 Januari 2016.
- "Demonstrasi Yang Kebablasan," dalam <https://www.tempo.co>, 28 Maret 2012, diakses pada 30 Januari 2017.
- "Indonesia Urutan Pertama Aksi Demonstrasi," dalam <http://www.antaraneews.com/>, diakses pada 30 Januari 2017.
- "Ini Data Konflik Agraria di Tanah Air Sepanjang Tahun 2013," dalam <http://www.kpa.or.id/>, diakses pada 31 Januari 2017.
- "Isu Sara Masih Membayangi Pilkada," 1 Februari 2017, dalam <http://www.beritasatu.com/>, diakses pada 3 Februari 2017.
- "Kerusuhan di Tolikara Jangan Meluas Jadi Konflik Agama," dalam <http://nasional.kompas.com/read/>, 17 Juli 2015, diakses pada 31 Januari 2017.
- Mitchell, Christopher, "Conflict, Social Change, and Conflict Resolution An Enquiry", Berghof Research Center for Conflict Management, 2005, dalam <http://citeseerx.ist.psu.edu>, diunduh pada 31 Januari 2017.
- "Marak Aksi Saling Lapori, Polri Kumpulkan Ormas Islam", dalam <http://www.cnnindonesia.com/>, 31 Januari 2017, diakses pada 2 Februari 2017.
- "Menyusul Konflik FPI dan GMBI, Gabungan Ormas Suarakan Petisi Jabar Kondusif", dalam <http://nasional.republika.co.id/>, 20 Januari 2017, diakses pada 3 Februari 2017.
- "Panglima TNI: Proxy War Mengancam Indonesia, " dalam <http://nasional.kompas.com/>, 19 Mei 2016, diunduh pada 27 Januari 2017.